

# ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME AUDIT INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR

---

**<sup>1</sup>Andi Gunawan Ratu Chakti**

<sup>1</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar

Alamat Surat

E-mail: [agungchakti@gmail.com](mailto:agungchakti@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to examine the effect of competence, independence, and professionalism on the performance of the regional inspectorate apparatus and examine the auditor's compliance with the Professional Standards of Public Accountants (SPAP). The general problem in this study is that the audit findings were not detected by the inspectorate apparatus as internal auditors, but were found by the external auditor, namely the Supreme Audit Agency (BPK). Operationally, research variables are described in several indicators. The variable of apparatus competence is translated into three indicators, namely mastery of accounting and auditing standards, governance insights, and skills improvement programs. The variable of apparatus independence is translated into two indicators, namely personal disturbances and external disturbances. The variable of apparatus professionalism is translated into four indicators, namely: dedication to the profession, social obligation, independence, and confidence in the profession. The audit performance variable is translated into four indicators, namely: process quality, result quality, and audit follow-up.*

*The population of this research is Makassar City Regional Inspectorate apparatus who follow periodic inspections. Data were collected from questionnaires distributed to respondents. The variables in this study are independent variables (X1), independence (X2) and professionalism (X3), while the dependent variable is audit performance (Y). Data were analyzed using multiple linear regression analysis (multiplerepression).*

*The results showed that competence and professionalism had a positive and significant effect on audit performance, while the independence variable had no significant effect on audit performance. The coefficient of determination shows that competence, independence, and professionalism together contribute to the dependent variable (audit performance) of 72.2%, while the remaining 27.8% is influenced by other factors outside the model. The implication of the findings of this study on efforts to realize a quality audit is the need for professionalism to auditors regarding the urgency of a quality audit in addition to efforts to increase competence through training.*

**Keywords:** *audit performance, competence, independence, professionalism*

## **Abstrak**

*This study aims to examine the effect of competence, independence, and professionalism of the Makassar City Inspectorate audit on the compliance of the Auditor's Sharia Economic Law on the Professional Standards of Public Accountants (SPAP). The general problem in this research is that audit findings are not detected by the inspectorate apparatus as internal auditors, but are found by external auditors, namely the Supreme Audit Agency (BPK). Operationally the research variables are in several indicators. The apparatus competence variable is divided into three indicators, namely mastery of accounting and*

## 2 | Andi Gunawan Ratu Chakti

*auditing standards, governance insight, and improvement programs. The apparatus variable is divided into two indicators, namely disturbances and external disturbances. The variables of apparatus professionalism are divided into four indicators, namely: dedication to the profession, social obligations, independence, and confidence in the profession. audit performance variables into four indicators, namely: process quality, result quality, and audit follow-up.*

*The population of this research is Makassar City Regional Inspectorate apparatus who follow periodic inspections. Data were collected from questionnaires distributed to respondents. The variables in this study are independent variables (X1), independence (X2) and professionalism (X3), while the determining variable is audit performance (Y). Data were analyzed using multiple linear regression analysis (multiplerepression).*

*The results showed that competence and professionalism had a positive and significant effect on audit performance, while the independence variable had no significant effect on audit performance. The coefficient of determination shows that competence, independence, and professionalism together contribute to the dependent variable (audit performance) of 72.2%, while the remaining 27.8% is influenced by other factors outside the model. Supervision of regional financial statements works as a means to facilitate the implementation of public services so that they can run according to the rules that God has set. Supervision is part of the maintenance of religion and property in the form of implementing amar makruf nahi munkar and accountability for the mandate and maintenance of public assets (public funds). So that it can be said that in general the concept of internal control mandated in the Government Regulation is in accordance with what is desired by the syarak, it's just that improvements must be made to the supervision system so that what is desired by the syarak can be carried out properly. The implication of the findings of this study on efforts to realize a quality audit is the need for professionalism to auditors regarding quality urgency audits in addition to efforts to increase competence through.*

**Kata Kunci:** *Hukum ekonomi syariah, kompetensi, independensi, profesionalisme*

## PENDAHULUAN

Auditor merupakan pihak yang berperan penting dalam pengontrol dan penjaga kepentingan publik dibidang yang terkait dengan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini tertuang dalam ketetapan Standar Audit – Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) tahun 1996 oleh BPKP dengan keputusan Kepala BPKP No. Kep-378/K/1996. SA-APFP secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Penyelenggaraan auditing sektor publik atau pemerintahan tersebut dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan suatu badan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif negara (presiden), yang bertugas untuk mengawasi dana

untuk penyelenggaraan pembangunan negara yang dilakukan pemerintah dan bertanggung jawab atas tugasnya pada pemerintah juga.

Penetapan Standar Audit di sektor publik ini harus dibentuk oleh suatu badan yang terlepas dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Berlakunya Standar Audit-Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP) tahun 1996 oleh BPKP atas perintah Presiden RI melalui Kepres No. 31, Tahun 1983 dan Inpres No. 15, Tahun 1983. Kalau kita melihat dari sini, tampak rancu karena eksekutif merupakan pihak yang diperiksa, tetapi di sisi lain dia menerbitkan peraturan untuk dirinya sendiri.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.

Kinerja audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Makassar saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar tahun anggaran 2012, terdapat 5 (lima) temuan. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti kinerja audit aparat inspektorat Kota Makassar masih relatif rendah. hal yang menyebabkan kompetensi aparat inspektorat Kota Makassar kurang optimal, adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman.

Sebagaimana auditor internal pada umumnya, aparat inspektorat termasuk di Kota Makassar berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan. Di samping itu, dengan jumlah penduduk 1.651.146 jiwa (BPS,2015) dapat menyebabkan hubungan

interpersonal, baik hubungan kekerabatan atau relasi kepentingan lainnya. Hal ini juga mempengaruhi independensi aparat inspektorat Kota Makassar.

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Jika auditor berpegang pada kode etik akuntan publik syariah, maka hal tersebut tidak akan terjadi karena seorang auditor syariah mempunyai Integritas. Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga mengajarkan bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya. Seorang akuntan muslim memiliki ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Akuntan muslim tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya. Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambaNya. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah, meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti.

Auditor dituntut untuk dapat mengemban amanahnya secara profesional. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Auditor tentu harus berpegang pada kode etik akuntan (Mardisar dkk, 2007)<sup>1</sup>. Kode Etik Akuntan atau Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariat Islam. Islam adalah agama Universal, yang mengatur seluruh kehidupan termasuk masalah akuntansi dan bisnis. Seperti, bagaimana Islam menekankan betapa pentingnya etika dalam akuntansi. Jika hal ini dilakukan dan dilaksanakan, maka kasus kecurangan dan kasus pelanggaran etika lainnya yang terjadi dalam bisnis dan profesi dapat dicegah dan dihindari (Harkaneri, 2013)<sup>2</sup>. Menurut Laela dan Meikhati (2009)<sup>3</sup>, sistem nilai Islam ditempatkan sebagai syarat, landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara

---

<sup>1</sup> Mardisar dan Sari. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. SNA X. Makassar.

<sup>2</sup> Harkaneri, H. (2013). Urgensi Etika dalam Akuntansi Dilihat dari Sudut Pandang Islam. Jurnal El-Riyasah. Ejournal : UIN Suska

<sup>3</sup> Laela, S. F., & Meikhati, D. L. (2009). Analisis Opini Auditor Sebagai Sinyal Kepailitan Suatu Perusahaan : Tinjauan Terhadap Perlunya Kode Etik Syariah Akuntan Publik. TAZKIA-Islamic Finance & Business Review, 4(1), 61–89.

Islam. Namun, landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam disamping dasar syariat.

Sebagaimana dikatakan oleh Arens & Loebbecke (2009)<sup>4</sup> profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan lebih dari sekedar dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi Undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme ini menjadi syarat utama bagi seseorang auditor seperti auditor yang terdapat pada Inspektorat Kota Makassar. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah (2010)<sup>5</sup>; Martiyani (2010)<sup>6</sup>; Nisfusa (2010)<sup>7</sup>; Rosnidah dkk (2010)<sup>8</sup>; Setiawan (2012) menunjukkan bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Audit Pada Inspektorat Daerah Kota Makassar”

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan kompetensi, independensi, dan Profesionalisme aparat sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi kinerja audit sebagai variabel dependen. Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian:

---

<sup>4</sup> Arens, A.A., J.K. Loebbecke. 2000. Auditing: An Integrated Approach. Eight Edition. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

<sup>5</sup> Irwansyah. 2010. Pengaruh ketaatan kompetensi dan independensi akuntan public terhadap profesionalisme akuntan publik dan implikasinya atas kualitas audit, survei pada akuntan publik yang menjadi anggota FAPB. Disertasi. Universitas Padjajaran Bandung.

<sup>6</sup> Milka, Martiyani (2010) PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TINGKAT MATERIALITAS DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN. Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jatim.

<sup>7</sup> Nisfusa, AL. 2010. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Hasil Laporan Pemeriksaan Auditor Internal Pada BUMN. Skripsi Universitas Pendidikan. Bandung.

<sup>8</sup> Ida Rosnidah. 2010. Kualitas Audit : Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Jurnal Akuntansi volume XIV/03/September/2010. Jakarta: Candi Mas Metropole.

- a. Apakah kompetensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kinerja audit Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan keuangan daerah?
- b. Apakah independensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kinerja audit Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan keuangan daerah?
- c. Apakah Profesionalisme aparat pengawasan berpengaruh terhadap kinerja audit Inspektorat Kota Makassar dalam pengawasan keuangan daerah?
- d. Bagaimana Pengawasan Laporan Keuangan Daerah terhadap Audit inspektorat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pemeriksaan ( auditing ) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002)<sup>9</sup>.

Sistem perekonomian Indonesia tidak lagi sebatas pada perekonomian konvensional. Sistem ekonomi Islam yang telah lama hanya menjadi bahasan diskusi para ahli kini telah banyak dipraktikkan dan diterapkan diberbagai sektor. Bermula dalam sektor perbankan yang ditandai dengan munculnya bank syariah, kemudian merambat pada sektor keuangan lainnya seperti asuransi, pasar modal, bisnis dan lainnya. Perkembangannya sangat pesat, dan pada saat ini banyak terdapat lembaga keuangan Islam telah beroperasi menerapkan sistem ekonomi Islam yang terdapat diberbagai belahan dunia bukan saja di negara Islam tetapi juga di negara non muslim.

Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. Tiga proses tersebut adalah perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan. Sampai sejauh ini, di Indonesia belum di atur mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah yang merupakan acuan untuk menyusun dan membuat pelaporan keuangan pemerintah.

Tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah di antaranya yaitu melakukan pengawasan keuangan. Beberapa kewenangan daerah yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah pelaksanaan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi, penyelesaian ganti rugi, serta inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan Pemda.

---

<sup>9</sup> Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama ( Rival dan Basri, 2005)<sup>10</sup>. Menurut Armstrong dan Baron (1998) dalam buku Wilson (2002)<sup>11</sup>, kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

## **METODE**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian Kausal Komparatif dan deskriptif untuk Mengkaji tingkat kepatuhan Hukum Auditor, serta analisis terhadap substansi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan interview. Wawancara mendalam dilakukan kepada para auditor internal di Inspektorat Pemerintah Kota Makassar. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara Kuantitatif dan Kualitatif dengan pendekatan deskriptif

### **Metode Analisis**

Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei yang dilakukan terhadap para auditor sistem informasi BPK. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (interview) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor pada Inspektorat Kota Makassar sebagai responden dalam penelitian ini. Interview yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi auditor, bagian kedua berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan independensi auditor, bagian ketiga berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan Profesionalisme auditor, dan bagian keempat berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kinerja

---

<sup>10</sup> Basri, A. F. M., dan Rivai, V.2005. Performance appraisal. Jakarta: PTRaja. Grafindo Persada.

<sup>11</sup> MATARIC, M. (1991). Navigating with a rat brain: A neurobiologically inspired model for robot spatial representation. In J.-A. Meyer & S. Wilson (Eds.), From animals to animats (pp.169–175). Cambridge, MA: MIT Press.

audit inspektorat. Kuesioner yang dikirimkan disertai dengan surat permohonan serta penjelasan tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Petunjuk pengisian kuisisioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban sesungguhnya dengan lengkap.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Makassar yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 38 orang. Alasan pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian adalah karena kinerja audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Makassar saat ini masih menjadi sorotan masyarakat. Pada beberapa kasus, aparat inspektorat sebagai auditor internal tidak mendeteksi adanya temuan audit sedangkan auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada obyek yang pengawasan yang sama dapat mendeteksi adanya temuan. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 38 kuesioner. Karena jumlah populasi kurang dari 100 responden, maka pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten saat diajukan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda. Untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari penerapan instrumen, maka diperlukan uji validitas, dan uji reliabilitas dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen kuisisioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas dilakukan dengan uji korelasi *Pearson Moment* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai korelasi item butir dengan skor total signifikan pada tingkat signifikansi 0,01 dan 0,02.

#### **2. Uji Reliabilitas**

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*. Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah *One*

*Shot*, artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ).

## **Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

#### **a. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

##### **1.) Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran P Plot dan grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

##### **2.) Uji Multikolinieritas**

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2006).

##### **3.) Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas,

tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji *Glesjer*. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2006).

### **b. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran data dengan kriteria nilai rata rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness*.

### **Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Y = kinerja audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

$\beta_0$  = intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien regresi

X1 = kompetensi

X2 = independensi

X3 = profesionalisme

Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor dilakukan dengan uji simultan dan uji parsial.

#### **a.) Uji Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika *probability value (p value)*  $< 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan jika *p value*  $> 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak. Uji F dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$ . Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (n-k-1), maka  $H_a$  diterima. Artinya, secara statistik data yang ada dapat

membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (n-k-1), maka  $H_a$  ditolak. Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

#### **b.) Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika  $p\ value < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan jika  $p\ value > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak.

### **PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA AUDIT**

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi adalah 0,294. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan  $p\ value$  0,037. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai t hitung 2,183  $>$  t tabel 2,040. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja audit.

Dalam hal variabel kompetensi ini, indikator yang sangat mempengaruhi kinerja auditor adalah penguasaan standar akuntansi dan auditing, dapat dilihat dari hasil pengujian ini bahwa auditor Inspektorat Kota Makassar telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat De Angelo bahwa kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi). Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harhinto (2004)<sup>12</sup> bahwa keahlian yang diproksikan dalam intensitas pengalaman dan tingkat pengetahuan auditor berhubungan positif terhadap kinerja audit. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kinerja audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kinerja audit yang dihasilkan akan rendah pula.

---

<sup>12</sup> Harhinto, Teguh . 2004. Pengaruh Keahlian dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada KAP di Jawa Timur. Semarang. Tesis Maksi. Universitas Diponegoro.

## **PENGARUH INDEPENDENSI TERHADAP KINERJA AUDIT**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel independensi adalah 0,226. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,123. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai t hitung  $1,587 < t$  tabel 2,040. Hal ini menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja audit.

Hasil pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan pendapat De Angelo bahwa kemungkinan dimana auditor akan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan Samelson et al.(2006)<sup>13</sup> yang menyimpulkan bahwa independensi tidak mempunyai hubungan dengan kinerja audit. Hipotesis 2 penelitian ini tidak berhasil dibuktikan, diduga karena independensi aparat inspektorat Kota Makassar masih terpengaruh dengan penentu kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja perangkat daerah. Akibatnya, meskipun aparat acapkali mendapat fasilitas dari auditee, namun aparat tetap menganggap bahwa audit yang baik tetap harus dilaksanakan dan mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

## **PENGARUH PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA AUDIT**

Hipotesis variabel Profesionalisme (X3) yang diprosikan dalam ketengguhan, keuletan, dan konsistensi, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi adalah 0,481. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,003. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai t hitung  $3,259 > t$  tabel 2,040. Hal ini menunjukkan bahwa Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja audit. Ini membuktikan bahwa Auditor di Inspektorat Kota Makassar telah sesuai dan menjalankan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sehingga semakin baik tingkat Profesionalisme, maka akan semakin baik kinerja audit yang dilakukannya.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Achmad Zulfikar Fauzi (2017)<sup>14</sup> bahwa semakin besar tingkat profesionalisme yang dimiliki seorang auditor investigatif maka pelaksanaan prosedur audit yang dilaksanakan akan semakin

---

<sup>13</sup> Samelson, Donald & Lowensohn, Suzanne & Johnson, Laurence. (2006). The determinants of perceived audit quality and auditee satisfaction in local government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 18. 139-166. 10.1108/JPBAFM-18-02-2006-B001.

<sup>14</sup> Fauzi, A., Perdana, H., & ., S. (2017). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan Kepatuhan Pada Kode Etik Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Fraud ( Kecurangan ). *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal Of Accounting And Business*, 2(1), 53-72. doi:10.20884/1.sar.2017.2.1.403

efektif. Sebaliknya, jika seorang auditor bersikap tidak profesional maka pelaksanaan prosedur audit yang dilaksanakan menjadi tidak efektif.

## **PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AUDIT INSPEKTORAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Fungsi utama pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar demi kemaslahatan rakyat. Sementara itu, tujuan penting syariat adalah menegakkan keadilan dalam memelihara tatanan hidup umat. Dengan berpegang pada prinsip amar makruf, maka keadilan akan mudah untuk diwujudkan.

Sebagaimana yang pernah dikonsepsikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya kesejahteraan masyarakat tidak pernah lepas dari tanggung jawab negara<sup>15</sup>. Secara umum pertanggungjawaban negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya (publik) dengan memperhatikan kesejahteraan spiritual dan moral di samping kesejahteraan material. Salah satu yang diwujudkan dalam kesejahteraan spiritual dan moral adalah penjagaan diri terhadap amanah atau pekerjaan yang diemban.

Hal ini selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh syariat, yaitu terwujudnya tatanan hidup umat. Pengawasan internal dianggap sebagai suatu wasā'il (sarana) untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Pengawasan internal juga merupakan bagian dari pemeliharaan agama dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan yang berhubungan erat dengan moral dan keimanan, yaitu dalam pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan pertanggung jawaban terhadap amanah. Selain itu, pengawasan internal juga merupakan suatu upaya terhadap pemeliharaan harta umum (public fund) agar dipergunakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah direncanakan dan terhindar dari sia-sia (mubazir).

Dengan demikian, Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah atau (APBD). Menurut undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang – undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan

---

<sup>15</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu ...*, hlm.243

program pembangunan daerah dan kerjasama internasional didaerah. Berdasarkan dari undang – undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Dengan demikian, pengawasan Laporan Keuangan Daerah sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak menyalahi dengan aturan syarak yang ada. Meskipun konsep pengawasannya tidak dikenal secara spesifik dalam aturan Islam dan implementasinya tidak menyamai dengan apa yang pernah dilaksanakan oleh para Khalifah Islam sebelumnya, ternyata dapat sesuai dengan tujuan syariat.

Pengawasan Internal di Indonesia dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan oleh APIP ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik sehingga dapat menjamin tercapainya kesejahteraan publik.

Sebagaimana yang lazimnya terjadi, pemahaman teoritik yang benar ternyata tidak dapat menjamin proses implementasinya akan konsisten sebagaimana konsep teoritiknya.<sup>16</sup> Pelaksanaan fungsi pengawasan internal inimasih harus dilakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai sisi. Keefektifan pengawasan internal sangat ditentukan oleh perbaikan sistem yang lebih baik, tegak, jelas, dan tidak tumpang tindih antar lembaga pengawasan. Terutama dalam hal penerapan azas independensi dan obyektif yang menjadi ruh dalam pelaksanaan pengawasan internal tersebut. Sehingga penerapan tata pemerintahan yang mengarah pada transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responsibility dapat berjalan dengan baik.

## **PENUTUP**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Inspektorat Kota Makassar terhadap substansi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi, independensi, dan Profesionalisme secara simultan berpengaruh terhadap kinerja audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Makassar. Hal ini membuktikan bahwa Auditor telah sesuai dan mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja audit, sehingga semakin baik tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kinerja audit yang dilakukannya.

---

<sup>16</sup> Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan,... hlm. 61.

3. Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja audit, sehingga independensi yang dimiliki aparat inspektorat tidak menjamin apakah yang bersangkutan akan melakukan audit secara berkualitas.
4. Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja audit, sehingga semakin baik tingkat Profesionalisme, maka akan semakin baik kinerja audit yang dilakukannya.
5. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, konsep pengawasan laporan keuangan Daerah yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara umum telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syarak. Meskipun perumusan kebijakan pengawasan tersebut tidak didasarkan oleh aturan Islam secara khusus, namun demikian tujuan syariat telah melekat padanya. Pengawasan dimaksudkan agar pemerintah melakukan tugasnya untuk mendukung kebijakan ekonomi dalam pelayanan publik dengan sebaik mungkin. Hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan syariat. Di mana pengawasan dianggap sebagai wasā'il dalam pemeliharaan agama dan harta, yaitu dalam hal pemeliharaan pertanggungjawaban amanah dan pemeliharaan terhadap harta umum. Pengawasan intern merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada tercapainya efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam pengembangan investasi publik yang kemudian akan mendorong peningkatan pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. October 2009 Research Days. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.*
- Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*
- Arens, A.A., J.K. Loebbecke. 2000. *Auditing: An Integrated Approach. Eight Edition. New Jersey: Prentice Hall International Inc.*
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan Ke dua belas, edisi revisi V. Jakarta : Rineka Cipta*
- Arrozi, M.F. 2004. " *expectation Auditor, Investor, dan Akuntan Manajemen terhadap pemeriksaan laporan keuangan*", *Simposium Nasional Akuntansi VII , 2-3 Desember 2004, Denpasar.*
- Badan Pemeriksa Keuangan. *Konsep (Draft V) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: BPK. Oktober 2005.*

- Badan Pemeriksa Keuangan. *Modul Diklat Auditor Terampil: Komunikasi dalam Pemeriksaan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta. 2005.*
- Badan Pemeriksa Keuangan. *Standar Audit Pemerintahan. Jakarta: BPK. 1995.*
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil: Teknik Komunikasi Audit. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta. 2003*
- BPKP. Mei 1996. "Standar Audit - Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-APFP)."
- BPKP. 1998. *Modul Diklat Peningkatan Kemampuan APFP Provinsi DI Yogyakarta.*
- Baridwan, Z, 1996 "Pendidikan Akuntansi dan Perubahan Peran dan Tanggungjawab Akuntan Publik, Konversi nasional akuntansi ke 3, Jakarta
- Cahyat,A. 2004. *Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. Governance Brief Number3*
- Elfarini, E.C. 2005. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang*
- Falah, S. 2005. *Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika. Universitas Diponegoro Semarang*
- Firdaus, SE.,Ak . 2005. "Auditing pendekatan pemahaman secara komprehensif", *Graha Ilmu. Makassar.*
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Edisi 3. BP Undip. Semarang*
- Goleman, D. 2001. *Working White Emotional intelligence. (terjemahan Alex Tri Kantjono W). Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama*
- Harhinto, T. 2004. *Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Kualitas Audit, Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur. Universitas Diponegoro Semarang.*
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi pertama. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang*
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2005. " *Standar Akuntansi Keuangan*", Salemba Empat, Jakarta
- Iskandar, Kaka 2013. *Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dan Risiko Audit. Diakses dari <http://iskandaaar.blogspot.co.id/2013/11/pengaruh-profesionalisme-auditor.html>*
- Jones, P. dan J. Bates. *Public Sector Auditing: Practical Techniques for an Integrated Approach. London, UK: Chapman and Hall, 1990.*
- Lowenshon, S., Johnson E.L., dan Elder J.R. 2005. *Auditor Specialization and Perceived Audit Quality, Auditee Satisfaction, and Audit Fees in the Local Government Audit Market*
- Nordiawan, Deddi S.E, Ak, M.M, 2006. " *Akuntansi sektor publik*", Salemba Empat. Jakarta
- Makmun, A.S., 2003, *Panduan Studi Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.*

- Mardiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mayangsari, S. 2003. *Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Suatu Kuasieksperimen*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 6 No. 1. Januari
- Messier, F.W., V.S. Glover, dan F.D. Prawitt. 2005. *Jasa Audit dan Assurance: Suatu Pendekatan Sistematis*. Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan. Edisi 4 Buku 1 & 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Mulyadi. 1992. *Pemeriksaan Akuntan*. Yogyakarta: Badan Penerbit STIE YKPN
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2008. *Fungsi dan Tugas Pokok Inspektorat Kota Gorontalo*. Gorontalo.
- Pramono, E.S. 2003. *Transformasi Peran Internal Auditor dan Pengaruhnya bagi Organisasi*. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* Vol. 3 No.2 Agustus
- Robbins, S.P., T.A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohman, A. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi* Vol. 7 No. 2. Januari.
- Rustandi, R. Achmad. 1985. *Gaya Kepemimpinan – Pendekatan Bakat Situasional*, PT. Armico, Bandung
- Saifuddin. 2004. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasieksperimen pada Auditor dan Mahasiswa)*. Semarang.
- Samelson, D., Lowenshon, S., and Johnson, L. 2006. *The Determinants of Perceived Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government*. *Journal of Public Budgeting, Accounting, & Financial Management*, Vol. 18, No. 2
- Sososutikno, C. 2003. *Hubungan Tekanan Anggaran Waktu dengan Perilaku Disfungsional serta Pengaruhnya terhadap kualitas Audit*. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya
- Sri Lastanti, Hexana. 2005. *Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan*. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* Vol.5 No.1 April 2005.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung

*Sunarsip, 2001, Coorporat Governance Audit : Paradigma Baru Profesi Akuntansi dalam Mewujudkan Good Coorporate Gvernance, Media Akuntansi, No. 17/Th. VII.pp. II-VII*

*Supriyono, R.A. 1988. Pemeriksaan Akuntan (Auditing) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik. Penerbit BPFE. Yogyakarta*

*Susmanto, Bintang. 2008. Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan*

*Rakyat.<http://www.menkokesra.go.id/content/view/117/323>*

*Tampubolon, R. 2005. Risk and Systems-Based Internal Audit. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta*